



**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh :

**EFRILISA ASNUNA HASIBUAN
NIM: 18 402 00101**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

EFRILISA ASNUNA HASIBUAN

NIM. 18 402 00101

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

EFRILISA ASNUNA HASIBUAN

NIM. 18 402 00101

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. EFRILISA ASNUNA HASIBUAN
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 20 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syahada Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. EFRILISA ASNUNA HASIBUAN yang berjudul "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

PEMBIMBING II

Zulaila Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRILISA ASNUNA HASIBUAN

NIM : 18 402 00101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022

Saya yang Menyatakan,



EFRILISA ASNUNA HSB

NIM. 18 402 00101

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM : 18 402 00101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM. 18 402 00101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : EFRILISA ASNUNA HASIBUAN
NIM : 18 402 00101
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Ketua,

Dra Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris,

Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 2018 01 2001

Anggota

Dra Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 2018 01 2001

Aliman Syahruri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 74,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,58
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Menilai
Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

NAMA : EFRILISA ASNUNA HASIBUAN
NIM : 18 402 00101

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi

Padangsidempuan, Januari 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1015

ABSTRAK

Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM : 18 402 00101
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu menggunakan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi pada akuntansi sektor publik khususnya kinerja keuangan daerah pada era otonomi daerah. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan penjelasan rasio efisiensi PAD yang mana suatu kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data primer berupa tugas dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio kinerja keuangan daerah, dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk rasio kemandirian sudah cukup memadai dimana tahun 2017 17,3% dan tahun 2018 sebesar 0,77%. Mengalami peningkatan pada tahun 2019, 2021 sebesar 17,3% dan 14,6% pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,77%. Untuk rasio efektivitas menunjukkan dalam kategori belum efektif pada tahun 2017 sebesar 63,80%, 29,83% pada tahun 2018, tahun 2019 63,80% dan tahun 2020 dan 2021 sebesar 58,22%, 29,83% tahun 2020. Rasio pertumbuhan pada tahun 2018/2017 sebesar -3,77% dan pada tahun 2020/2019 sebesar 0,29% dan pada tahun 2021/2020 sebesar 0,71%. Kemudian pada rasio efisiensi pada tahun anggaran 2017, 2019, 2020 dan 2021 termasuk kategori sangat efisiensi, sedangkan pada tahun 2018 dikategorikan efisiensi.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat sampai ke tahap skripsi sebagai tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dan tak lupa pula Shalawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi peneliti berjudul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.”** Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna serta disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang masih terbatas, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka skripsi ini pastinya tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat serta kerendahan hati dan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M. Ad. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A Selaku Pembimbing I dan ibu Zulaika Matondang, S.Pd., M.Si., Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku untuk menyelesaikan skripsi peneliti.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses belajar dibangku perkuliahan di UIN Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga besar (Ayahanda Asari Hasibuan dan Ibunda Tercinta saya Nurainun Pohan) yang telah membesarkan dan mendidik saya dan yang selalu mendoakan yang terbaik tiada hentinya, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang paling berjasa bagi hidup peneliti dengan begitu banyak pengorbanan sehingga peneliti tumbuh dewasa sampai mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Ayahanda dan Ibunda berjuang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah berputus asa demi masa depan putra dan putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tersayang dan semoga Allah SWT membalas atas perjuangan dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan surga firdaus Allah SWT.
8. Kepada Saudara-saudara saya, adik Bismar Al-Akbar Hasibuan, adik Nursamsiah Pasyah Hasibuan, adik Mustofa Hakiki Hasibuan, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan serta rahmat-Nya. Serta seluruh keluarga besar dari Ayah dan Ibu Peneliti yang telah memberikan motivasi dan memberikan bantuan moral dan material bagi peneliti sehingga sampai ke tahap ini.

9. Kepada sahabat saya Fanisah Yuliyanda, Nur Amanah Bunda, Eva Riskiah, Safika Zebua, Afifah Ramadhani, Punad. serta seluruh keluarga besar Akuntansi I dan seluruh sahabat-sahabati seperjuangan Mahasiswa/Mahasiswi angkatan 2018 yang telah saling berbagi ilmu pengetahuan dan yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada sahabat SMP saya Annisa Chikal, Ismah Meiyani, Elsa Anzely, Ryan Aprilka Tobing, M Risky Pratama , dan sahabat SMA saya Dicnessya Salsadila, Nurleini Budi, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi dan dukungan yang sangat hebat.
11. Kepada Sepupu saya tercinta kakak Yustina Rangkuti, Aryani Lubis serta sepupu lainnya yang telah memberikan saya motivasi dan supportnya selama dibangku perkuliahan.
12. Rekan seperjuangan saya grup KKL dan grup Magang yang telah memberikan semangat yang tiada henti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan semuanya yang telah banyak membantu dan memberikan *support* kepada peneliti sampai detik ini.

Peneliti sangat mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menjalani perkuliahan sampai pada detik ini yaitu sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati peneliti sadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan pastinya jauh

dari kata sempurna dengan berbagai pengalaman dan terbatasnya pengetahuan peneliti. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan hasil penelitian ini, semoga memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita semua terutama pembaca dan peneliti berikutnya.

*Wallahul Muwaffieq Ila Aqwamith Thorieq. Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Padangsidimpuan, November 2022

Peneliti,

EFRILISA ASNUNA HASIBUAN

NIM: 18 402 00101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

1. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

2. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

1. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

2. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

4. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

7. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional	7
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori	14
1. Landasan Teori.....	14
a. Pengertian Kinerja Keuangan	14
b. Laporan Keuangan Daerah.....	17
c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Daerah	18
d. Pengukuran Kinerja Keuangan	24
e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	27
f. Indikator Kinerja Keuangan	28
g. Pendapatan Asli Daerah	30
h. Pengelola Keuangan Daerah	32
i. Laporan Realisasi Anggaran	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38

B. Jenis Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Labuhanbatu	45
1. Sejarah BPKAD Kabupaten Labuhanbatu	45
2. Visi dan Misi dan motto BPKAD Kabupaten Labuhanbatu	47
3. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Labuhanbatu.....	49
B. Deskripsi Data Penelitian.....	51
C. Pembahasan.....	60
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 Laporan Realisasi Anggaran	5
TABEL II. 1 Penelitian Terdahulu.....	34
TABEL III. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	42
TABEL III. 2 Kriteria Pengukuran Efektivitas	44
TABEL III 3 Kriteria Laju Pertumbuhan.....	54
TABEL III 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah.....	54
TABEL IV. 1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	55
TABEL IV. 2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ...	57
TABEL IV. 3 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	59
TABEL IV. 4 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pikir	38
Gambar IV. 1 Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Labuhan batu...	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Mohon Izin Pra Riset
- Lampiran 4 Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa Politik
- Lampiran 5 Surat Balasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan 2017
- Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2019
- Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020
- Lampiran 9 Dokumentasi Dengan Pihak BPKAD
- Lampiran 10 Surat Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam kegiatan administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*.¹ Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dan pelayanan publik. Pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah harus dikelola dengan baik, salah satu dengan pengelola keuangan daerah. Potensi daerah tersebut dapat diukur melalui keuangan daerah yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengukur kinerja kemampuan daerah ini dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio

¹Aji Primanto, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia* (Malang: PT. Cita Instrans Selaras, 2020), hlm. 113.

keuangan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode-periode sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi satu alat ukuran untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan perndanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Menurut kasmir rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen yang ada di antara laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan.² Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.³ Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar

²Sufyati Hs, dkk, *Indikator Keuangan & Non Keuangan* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hlm. 36.

³Ana Sopanah dkk, *Akutansi Publik* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020), hlm. 189.

pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara hasil yang dicapai suatu program dalam memenuhi tujuan yang diharapkan. Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam realisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Rasio efektivitas bertujuan mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakan pendapatan sesuai dengan anggaran yang ditargetkan.
3. Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya.
4. Rasio Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Adanya analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, rasio kinerja keuangan daerah akan membantu pemerintah dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui laporan realisasi anggaran yang menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas.

Pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah harus dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkan sumber daya yang handal. Potensi daerah tersebut diukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan aturan-aturan penggunaan keuangan daerah yang baik. Pemberdayaan potensi pemerintah yang baik akan mampu menjalankan kewajiban kinerja keuangan daerah tersebut untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi publik.

Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Muhammad Idris Hasibuan, Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kasubbag umum dan kepegawaian BPKAD, dan memperoleh data melalui dokumentasi, yaitu laporan realisasi anggaran pada tahun 2017-2021.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu bekerja untuk melaksanakan sebagian tugas dalam hal bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dijadikan sebagai bukti pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan terhadap laporan pertanggungjawaban akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas pelaksanaan APBD. BPKAD juga melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, yang kemudian akan disusun

berdasarkan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu BPKAD juga melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Tabel 1.1
REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan Daerah	1.312.715.109.320,71	133.747.770.325,97	1.318.715.109.320,71	933.747.770.325,97	1.094.201.970.193,41
Total Belanja	1.367.519.966.301,99	945.701.763.681,84	1.367.519.966.301,99	945.701.763.681,84	1.009.426.053.168,53
Surplus / (Defisit)	(48.804.856.981,28)	(11.953.993.355,87)	(48.804.856.981,28)	(11.953.993.355,87)	84.775.917.024,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel I.1 bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp. 48.804.856.981,28. Tahun 2018 juga mengalami defisit sebesar Rp. 11.953.993.355,87. Kemudian pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp. 48.804.856.981,28. Tahun 2020 juga mengalami defisit sebesar Rp. 11.953.993.355,87. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp. 84.775.917.024,88. Terjadinya defisit dikarenakan realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan terjadinya surplus dikarenakan lebih besar realisasi anggaran pendapatan daerah dibandingkan dengan realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa

pada tahun 2017-2021 terjadi peningkatan dan penurunan atas realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menyebabkan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami keuangan yang realisasinya minim disebabkan pendapatan asli daerah yang sedang menurun. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Oleh karena itu peneliti berminat melakukan penelitian dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah, melalui analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD), menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. **“ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat diketahui beberapa masalah yang muncul pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga dapat diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu sifatnya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2017-2021

2. Laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2020 mengalami defisit sedangkan tahun 2021 mengalami surplus.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah akan memudahkan peneliti dalam memahami pembahasan yang tidak melenceng dari permasalahan dan sasaran yang dituju. Dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini difokuskan banyaknya rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan namun dalam penelitian ini meneliti hanya menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan efisiensi dengan menggunakan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2021.

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang terdapat dalam definisi operasional penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter rasio, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian merupakan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus rasio kemandirian, yaitu:⁴

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan transfer dan pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD merupakan hubungan antara hasil yang dicapai suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan target dari suatu kegiatan maka semakin efektif suatu organisasi tersebut. Adapun rumus rasio efektivitas pengelola anggaran daerah yaitu:⁵

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah

⁴Kurhayadi dkk, *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 131.

⁵Ruki Ambar dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: CV. Media Sins Indonesia, 2022), hlm. 214.

dicapainya dari periode-periode berikutnya. Adapun rumus rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:⁶

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADtn} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Keterangan :

PADtn = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun akhir.

PADt0 = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun awal.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan:⁷

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efektivitas pada tahun 2017-2021?

⁶Seri Suriani, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 23.

⁷Kurhayadi dkk, *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 133.

3. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021?
4. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2017-2021?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efektivitas pada tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2017-2021.

G. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini dapat berguna untuk bidang yang berhubungan dengan penelitian ini dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari bangku kuliah, dan menambah pengalaman dan sarana latihan bagi peneliti dalam memecahkan masalah yang ada di dalam analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Serta menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang keuangan.

2. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Dapat menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

3. Bagi Kabupaten Labuhanbatu

Penelitian ini yaitu berguna membantu intansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dalam penerapan analisis rasio keuangan daerah. Dan penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kinerja keuangan pada laporan realisasi anggaran dan pendapatan yang sesuai tujuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengaplikasikan dalam penelitian yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini memperoleh pembahasan yang sistematis dan sesuai dengan kenyataan masalah yang ada, perlu menyusun sistematika penulisan

sedemikian rupa. Sehingga memudahkan penulisan dalam melakukan penyusunan proposal yang baik dan mudan. Adapun sistematikannya yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah mengenai rasio-rasio keuangan daerah dan hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian terhadap judul peneliti, dan didukung dengan bagian lainnya seperti identifikasi masalah, batasan masalah tentang fokus masalah agar tidak menyimpang dari pembahasan penelitian, defenisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan teori-teori yang mendukung penyusunan karya ilmiah, penelitian yang relevan, permasalahan yang dikaji dan berisi tentang permasalahan dalam penelitian, dan berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian, dengan sub judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang berisi mengenai hasil penelitian menggunakan analisis rasio keuangan dalam menjalankan kegiatannya dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan akhir dari hasil penelitian dan saran yang membantu perbaikan terhadap peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Analisa kinerja keuangan perusahaan dirasakan penting tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri melainkan bagi berbagai *stakeholders* perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi nonakuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan.⁸

Kinerja keuangan pemerintah merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi

⁸Gusti Ayu Purnama, *Akutansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 139.

laporan keuangan pemerintah pusat. laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Permerintah Pusat adalah menteri keuangan selaku pengelola fiskal, yang akan disampaikan kepada presiden. Sedangkan, yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan kementerian negara/lembaga adalah menteri/pimpinan lembaga. Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif pada periode tertentu. Kinerja keuangan ditinjau oleh perusahaan untuk melakukan atau adanya evaluasi dari aktivitas perusahaan yang sedang berjalan pada periode waktu tertentu, untuk tetap menjaga kinerja perusahaan yang efektif. Kinerja keuangan menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam laporan keuangan.⁹

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹⁰ Menurut Fahmi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan

⁹Sufyati HS dan Via Lita Bethry Anlia, *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi* (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 20.

¹⁰Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Multiavisitama 2020), hlm. 2.

keuangan secara baik dan benar.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Daerah adalah tingkat tercapainya dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Dimana kinerja keuangan ditinjau oleh perusahaan untuk melakukan atau adanya evaluasi dari aktivitas perusahaan yang sedang berjalan pada periode waktu tertentu, untuk tetap menjaga kinerja perusahaan yang efektif.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penetapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah , antara lain memberikan keleluasan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
- 2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

¹¹Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 142.

- 3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

b. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Halim tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 tahun 2004, Modul Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan menyatakan bahwa jenis-jenis laporan keuangan adalah:

- 1) Laporan realisasi anggaran Laporan realisasi anggaran keuangan menyajikan iktisar sumber, alokasi dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Adapun unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran adalah:

a) Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan menurut basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Belanja

Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu

antitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbang dan dana bagi hasil.

d) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

a) Aset (*Assets*)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang terpelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak lain langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal dari

pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana terdiri dari: Ekuitas dana lancar adalah selisih selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Laporan arus kas (statement of cash flow)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

- 4) Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements).

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menjadikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Pada laporan keuangan Kementerian Negara/lembaga, informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro ini tidak harus diungkapkan.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan.
- d) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi.

- e) Informasi rinci tentang pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disajikan dalam LRA, pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitasdana yang disajikan dalam neraca dan pos-pos arus kas masuk dan keluar yang disajikan dalam LAK.
- f) Kejadian penting setelah tanggal pelaporan.
- g) Informasi tambahan lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka.

d. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan dan akan dapat diketahui hasil-hasil yang dicapai dari waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Perkembangan dalam pengukuran kinerja keuangan semakin

beragam dan mempunyai keunggulan serta kelemahannya masing-masing.¹²

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa setiap yang dikerjakan akan menghasilkan keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan. Setiap orang yang produktif dalam melakukan pekerjaannya akan mendapatkan imbalan sesuai yang dikerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُؤْفِقَهُمْ ۗ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ
لَا يُظَالَمُونَ

Artinya: Dan setiap manusia memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dan Allah mencukupkan imbalan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.¹³

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa tafsir ayat tersebut adalah permintaan untuk memperkerjakan pemuda dalam mengurus domba dengan gaji. Sungguh itu merupakan orang yang baik untuk diperkerjakan, karena memiliki tenaga yang kuat dan dipercaya.¹⁴ Maka dari ayat tersebut bisa diperoleh nilai atau pembelajaran, yaitu setiap orang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalan sesuai perbuatan yang dilakukannya. Misalnya bagi manusia yang melakukan perbuatan baik akan

¹²Maya Sari, *Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance* (Jawa Timur: Lentera Hati, 2021), hlm. 17-18.

¹³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2012), hlm. 412.

¹⁴Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh yang Adil dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Guepidia, 2020), hlm. 68.

diangkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya, manusia yang tidak berusaha atau melakukan perbuatan yang ingkar Allah tidak akan mengangkat derajatnya.¹⁵

e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat lagi manajemen dan pengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu dalam manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian

¹⁵Arman Permansyah Arde Irvi Nurul Husna, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam* (Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, 2021), hlm. 101.

kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukur kinerja keuangan tersebut.¹⁶

f. Indikator Kinerja Keuangan

Menurut peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini indikator akan dikategorikan. Suatu indikator kinerja kedalam ukuran upaya dan ukuran hasil serta membedakan antara ukuran penyedia layanan dengan ukuran bagi masyarakat.

Namun di dalam suatu pemerintah daerah yang dimana mempunyai untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio, yaitu :

- 1) Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan transfer).¹⁷

¹⁶ Endah Prawesti Ningrum, *Nilai Perusahaan Konsep dan Aplikasi* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 35.

¹⁷Mulyanto, *Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe* (Lhokseumawe: Bappeda Lhokseumawe, 2018), hlm. 64.

- 2) Rasio Efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen.¹⁸
- 3) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat beberapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisiensi atau tidak.¹⁹ Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.
- 4) Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya.

¹⁸Ana Sopanah dkk, *Akutansi Publik* (Surabaya: Media Pustaka, 2020), hlm. 190.

¹⁹Primandita dkk, *Bunga Rampai Keuangan Negara* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020), hlm. 116.

g. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Primbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 6 bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang yang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yang dimaksud retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain atau badan.²⁰

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan.

²⁰Ni Putu Myari Artha, *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hlm. 5.

Penerimaan PAD menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD, BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi setelah itu.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah.

h. Pengelola Keuangan Daerah

Pengelola keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian *Value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.²¹

²¹Yosep P. Koton, *Restrukturisasi Organisasi* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 31.

i. Laporan Realisasi Anggaran LRA

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, telah

dilaksanakan secara efisiensi , efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel I.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Rindang Arumdari, 2019. ²²	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan, Pada Tahun 2013-2017	Hasil penelitian Kinerja keuangan dari rasio kemandirian di tahun 2013-2017 termasuk kategori pola hubungan partisipasif, rasio efektivitas ditahun 2013-2017 termasuk kurang efektif, Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2014-2017 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan.
2	Arfan Prasetya, 2019. ²³	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan	Hasil tahun rasio mandiri 2008-2009 belum mandiri. Rasio Efektivitas 2008-2011 sudah termasuk efektif, tapi di tahun 2012 mengalami penurunan dan belum efektif.

²²Rindang Arumdi, *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

²³Arfan Prasetya, *Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019).

		Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering (OKI)” Tahun, 2008-2012.	Rasio Efisiensi tahun 2008-2012 cukup efesiendi dan cukup baik, Rasio pertumbuhan yang tinggi terjadi tahun 2010/2011 , dan tahun 2008-2009 mengalami penurunan.
3	Ayu Kustia, 2018. ²⁴	Analisis Rasio Pengelola Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Gowa, Tahun 2014-2016.	PAD pada tahun 2014-2016 rasio pertumbuhan meningkat efektif. Raio realisasi PAD ditahun 2014-2016 mengalami peningkatan kemudian tahun 2016 mengalami penurunan drastis.
4	Norma, 2020. ²⁵	Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.Tahun 2016-2018	Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Keuangab Daerah Kabupaten Enrekang Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% .Daerah pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan pada rasio mandiri.

²⁴Ayu Kustia, *Analisis Rasio Pengelola Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018).

²⁵Norma, *Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

5	Syafia Nurul Aeni, 2020. ²⁶	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019.	Rasio kemandirian 2015-2019 mengalami peningkatan. Rasio efektifitas PAD penaikan ditahun 2017 tergolong efektif, dan mengalami penurunan 2018 peningkatan kembali 2019 sebesar. Pada rasio efisiensi mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016, mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 .Rasio Pertumbuhan memiliki pertumbuhan yang negative pada ahun 2018, tahun 2015-2019 memiliki trend positif.
---	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada penelitian Rindang Arumdari, yaitu sama-sama menilai kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan. Perbedaan pada penelitian Rindang Arumdari hanya menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektifitas, sementara peneliti saat ini meneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.
- b. Pada penelitian Arfan Prasetya persamaannya dengan peneliti saat ini sama sama membahas rasio keuangan. Perbedaannya pada penelitian Arfan Prasetya menggunakan teknik analisis data dalam mengukur

²⁶Syafia Nurul Aeni, *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019* (Skripsi: Politeknik Harapan Bersama, 2020).

kinerja keuangan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

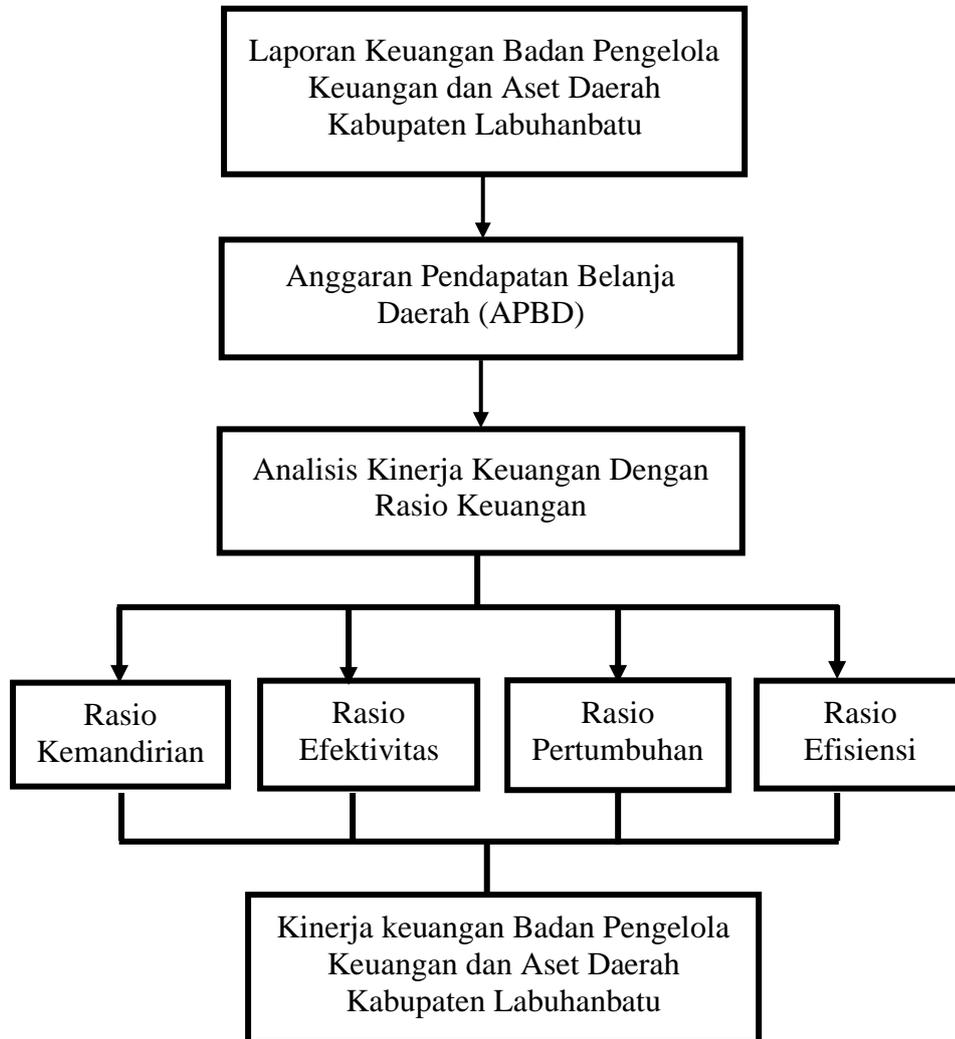
- c. Pada penelitian Ayu Kustia yang berjudul Analisis Rasio Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah. Persamaannya dengan penelitian yaitu sama-sama menganalisis rasio keuangan daerah pada laporan realisasi anggaran PAD. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Ayu Kustia tidak menggunakan rasio kemandirian, sementara peneliti saat ini menggunakan rasio kemandirian.
- d. Pada penelitian Norma yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Persamaannya yaitu menganalisis rasio keuangan daerah dengan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perbedaannya adalah penelitian Norma menganalisis rasio keuangan hanya menggunakan rasio efektivitas dan pertumbuhan, sedangkan peneliti saat ini dalam menganalisis menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi PAD.
- e. Pada penelitian Syafia Nurul Aeni yang berjudul Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Perbedaannya dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafia Nurul Aeni menggunakan rasio desentralisasi. Persamaannya yaitu sama-sama menilai kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan daerah.

C. Kerangka Pikir

Organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sektor publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagaimana di tunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tersebut yang dilakukan di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu . Penelitian analisis rasio keuangan daerah untuk menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten labuhanbatu dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan.²⁷ Tujuan dilakukannya penelitian melalui pendekatan kuantitatif deskriptif agar mendapatkan informasi dan membuktikan tentang analisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan daerah pada kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

²⁷Siti Azizah, *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah Ilmu Peternakan* (Malang: UB. Press, 2021), hlm. 62.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dan data primer. Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan berwujud dokumentasi atau data laporan keuangan yang telah tersedia, dan telah tersusun baik yang dipublikasikan maupun tidak di publikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Data Primer merupakan tugas dan stuktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara.²⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan kasubbid pengelolaan belanja SKPD, yaitu Bapak Fadil Hidayat.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Data sekunder juga merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2017-2021

²⁸Nur Ahmad Budi Yuliyanto dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), hlm. 37.

²⁹Evanirosa dkk, *Penelitian Perpustakaan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 87.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. Wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari, dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.³⁰ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti dengan kasubbid pengelolaan belanja SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Bapak Fadil Hidayat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh melalui catatan, buku, data, surat kabar dan agenda lainnya yang berisis catatan peristiwa penting. Jadi dalam penelitian ini akan dihimpun data-data secara tidak langsung yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah seperti laporan realisasi APBD dan struktur organisasi.

³⁰Bambang Sudaryana dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), hlm. 165.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator Kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggunakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi:³¹

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel III. 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsuktatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

³¹Jumita Putri Rajana Harahap dan Murni Dahlena Nasution, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan pada Kinerja Pemerintah Kota Medan,” dalam jurnal: Administrasi Bisnis 8, No. 1 (2019): hlm. 4.

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020.

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena Daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.³²

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang beberapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

³²Primandita dkk, *Bunga Rampai Keuangan Negara* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020), hlm. 113-114.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas mencapai 100%. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektivitas	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020

3. Rasio Pertumbuhan

Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADtn} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Keterangan :

PADtn = Total Pendapatan Daerah pada tahun akhir.

PADt0 = Total Pendapatan Daerah pada tahun awal.

Kriteria untuk menetapkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikategorikan dengan kriteria pertumbuhan seperti tabel berikut:

Tabel III. 3
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2008)

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut, suatu organisasi dikatakan efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel III. 4
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi %	Kriteria
<5	Sangat Efisiensi
5 – 10	Efisiensi
11 – 20	Cukup Efisiensi
21 -30	Kurang Efisiensi
>30	Tidak Efisiensi

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008. Kemudian Kabupaten Labuhanbatu dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten otonom yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009. Berdasarkan hasil pemekaran, ibukota pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah Rantauprapat yang mana wilayah dari labuhanbatu terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan menjadi 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk 418.992 jiwa.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan sektor publik yang memiliki tugas dalam membantu urusan pemerintah daerah, yaitu bupati dalam bidang keuangan dan aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab dan berkedudukan berada dibawah Bupati melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang diangkat berdasarkan pemilihan kepala daerah langsung. Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, susunan organisasi dalam pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 40 (empat puluh) SKPD yang terdiri dari 36 SKPD melaksanakan urusan wajib, salah satu diantaranya SKPKD dan empat SKPD yang melaksanakan urusan pilihan. Dan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No.22 tahun 2016 yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Oktober tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang kepala Badan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Visi, Misi, dan Motto Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2020, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya 2025.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum untuk upaya penegakan hukum dalam memberantas KKN, mencegah tindak kriminal, dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa.
- 2) Menciptakan SDM berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang

mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika.

- 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standar internasional.
- 4) Membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
- 5) Menciptakan sinergi pembangunan di bidang transportasi infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

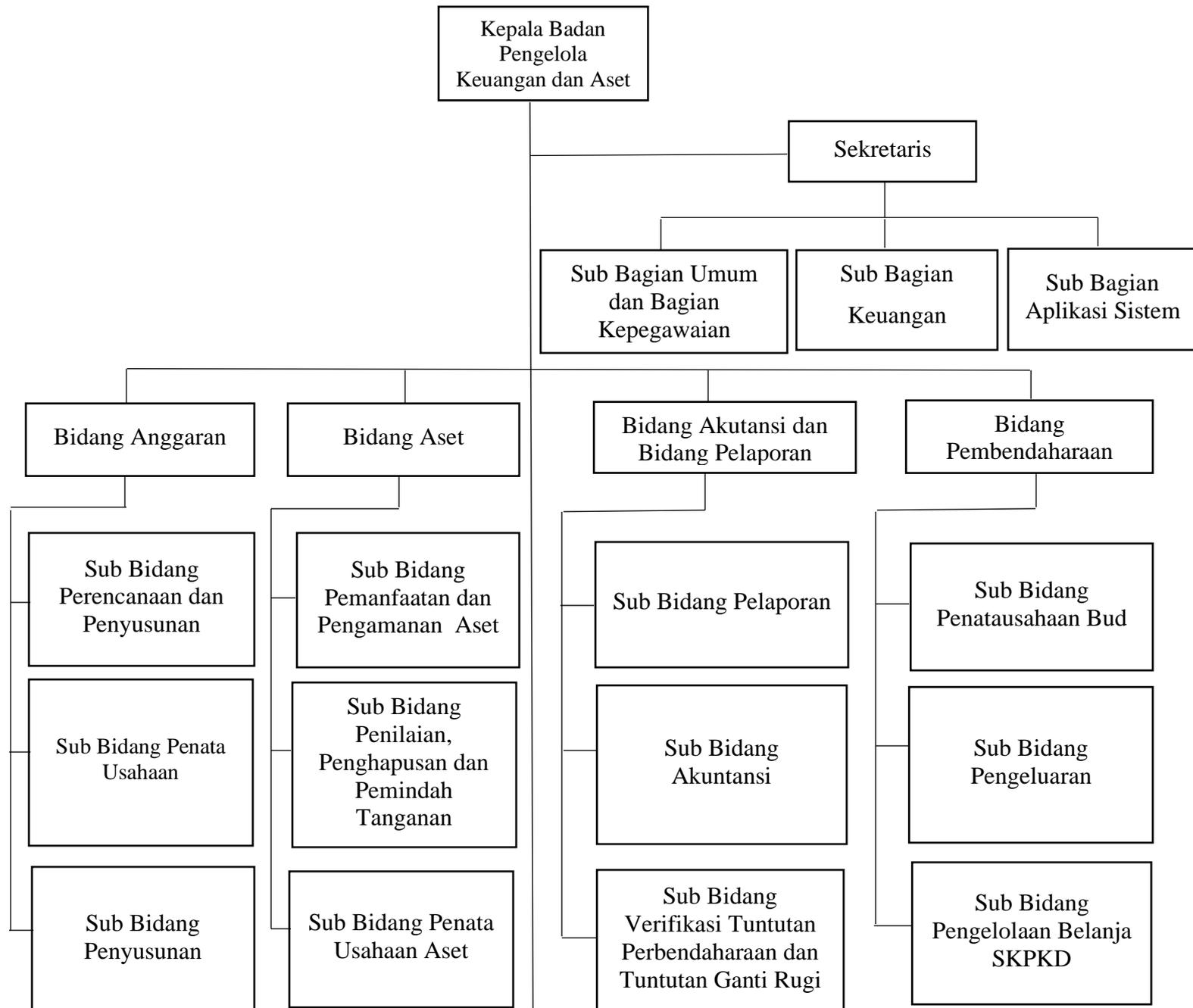
c. Motto

Motto Kabupaten Labuhanbatu adalah “IKA BINA ENPABOLO” yang artinya sebagai berikut: Ini dibangun itu diperbaiki. Dalam arti yang luas, semboyan ini bermakna kekompakan/kerjasama atau gotong royong dalam membangun dan memperbaiki sesuai dengan bidang/fungsi dan kemampuan masing-masing, sehingga terwujud apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

3. Struktur Umum Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Gambar IV. I
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Keterangan :

1. Kepala Badan bertugas membantu bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKAD dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta aplikasi sistem informasi.
3. Sub bagian umum dan kepegawaian bertugas Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal bidang urusan pengelolaan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
4. Sub bagian keuangan bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan.
5. Sub bagian aplikasi sistem informasi bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal bidang urusan pengelolaan aplikasi sistem informasi.

6. Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan KUA-PPAS, KUPAPPAS Perubahan, Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
7. Sub bidang penatausahaan anggaran bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja langsung.
8. Sub bidang penyusunan anggaran satuan kerja pengelolaan keuangan daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran SKPKD dan perubahannya meliputi Penerimaan SKPKD, Belanja Tidak Langsung SKPKD dan Pembiayaan.
9. Sub bidang pengelolaan belanja satuan kerja pengelolaan keuangan daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam Mengumpulkan bahan dan memeriksa serta meneliti Administrasi bukti belanja hibah dan bantuan sosial serta pembiayaan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan merupakan gambaran kinerja perusahaan yang dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan disusun untuk mengetahui kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kinerja masa lalu.³³ Laporan keuangan sangat perlu untuk mengukur hasil dan perkembangan perusahaan dari period ke periode dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya.

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, dengan analisis rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi. Disajikan dengan maksud untuk melihat kondisi keuangan pada setiap periode tertentu, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, dan

³³Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hlm. 10.

mengukur masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.³⁴ Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas keuangan daerah, menilai pertumbuhan keuangan daerah dan rasio efisiensi untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Data tersebut yang akan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

³⁴Yoyo Sudaryo dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 9.

selama kurang waktu 5 tahun terakhir (2017-2021). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan bayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.³⁵ Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1V. 1
Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian
2017	175.334.946.116,71	1.012.228.495.149,00	17,32%
2018	67.379.199.960,97	866.368.570.365,00	0,07%
2019	175.334.946.116,71	1.012.228.495.149,00	17,32%
2020	67.379.199.960,97	866.368.570.365,00	0,07%
2021	139.566.608.578,41	950.575.832.700,00	14,68%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah: Oktober 2022).

³⁵Harmovinsah dkk, *Akuntansi Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 189.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat/ provinsinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi mandiri keuangan daerahnya.³⁶

Berdasarkan tabel IV. 1 diatas, terlihat bahwa Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017-2021 tingkat kemandiriannya mengalami peningkatan hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017 sebesar 17,32%, yang termaksud dalam kategori rendah sekali. Untuk tahun 2018 sebesar 0,07% mengalami penurunan dimana dalam pola hubungan instruktif. Pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 17,32%, pada tahun 2019 dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif dan 0,07% pada tahun 2020 digategorikan rendah sekali dimana pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2021 sebesar 14,68% dikategorikam rendah sekali dan dalam pola hubungan instruktif.

Kemampuan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari rasio kemandirian diatas menunjukan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan urusan otonomi.

³⁶Kurhayadi dkk, *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 131.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, apakah bisa memenuhi tujuan diterapkan. Sehingga efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai, semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan ataupun target dari sesuatu kegiatan maka semakin efektif suatu organisasi tersebut.³⁷ Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel IV. 2
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2017	175.334.946.116,71	225.869.464.200,00	77,63%
2018	67.379.199.960,97	225.869.464.200,00	29,83%
2019	175.334.946.116,71	225.869.464.200,00	77,63%
2020	67.379.199.960,97	225.869.464.200,00	29,83%
2021	139.566.608.578,41	239.690.323.904,00	58,22%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. (Data diolah, Oktober 2022).

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel IV. 2 hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Labuhanbatu yaitu tepatnya diawali pada tahun 2017 dan 2018 dikatakan tidak efektif dimana rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah sebesar 77,63% dan pada tahun 2018 menjadi 29,83%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 77,63% dan pada tahun 2020 menjadi 29,83%, dan pada tahun 2021 mengalami

³⁷Ruki Ambar Arum dkk, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 214.

peningkatan sebesar 58,22% dikategorikan tidak efektif. Pada dasarnya analisis rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio diatas dapat digambarkan kemampuan daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugasnya belum efektif karena memperoleh rasio efektivitas di bawah angka $<75\%$.

Melalui analisis rasio efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan lebih mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan penurunannya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan tidak efektif pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor bisnis. Tingkat pertumbuhan dasar hanyalah perbandingan antara dua nilai dalam periode waktu tertentu, yang

dinyatakan sebagai persentase nilai awal.³⁸ Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibandingkan dengan periode sebelumnya, semakin besar rasio pertumbuhan maka semakin baik.³⁹ Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_{tn} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

Tabel IV. 3
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017- 2021

Tahun	PAD _{tn} (Rp)	PAD _{t0} (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2018/2017	133.747.770.325,97	1.312.715.109.320,71	-0,90%
2019/2018	933.747.770.325,97	133.747.770.325,97	5,98%
2020/2019	933.747.770.325,97	1.318.715.109.320,71	-0,29%
2021/2020	1.094.201.970.193,41	933.747.770.325,97	0,17%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah, Oktober 2022).

Pada tabel IV. 3 di atas, rasio pertumbuhan pada tahun 2018/2017 sebesar -0,90% naik menjadi 5,98%, pada tahun 2019/2018, kemudian turun menjadi -0,29%, pada tahun 2020/2019, dan pada tahun 2021/2020 sebesar 0,17%.

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu belum begitu baik karena selama kurun waktu 5 tahun ini yang terlihat rasio pertumbuhan belum stabil karena mengalami turun naik dari tahun ketahun. Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan

³⁸Dr. Seri Suriani, *Analisis Laporan Keuangan Kinerja Manajemen dan Prospek* (Malang: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 23.

³⁹Syahril Efendi, *Akutansi Keuangan SKPD/SKPKD Pemerintah Daerah* (Batam: CV. Batam Publisher., 2021), hlm. 185.

baik karena pemerintah daerah dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.⁴⁰ Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV. 4
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi
2017	1.367.519.966.301,99	1.312.715.109.320,71	1,04%
2018	945.701.763.681,84	133.747.770.325,97	7,07%
2019	1.367.519.966.301,99	1.318.715.109.320,71	1,03%
2020	945.701.763.681,84	933.747.770.325,97	1.01%
2021	1.009.426.053.168,53	1.094.201.970.193,41	0,92%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah: Oktober 2022)

Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasionya maka kinerja pemerintah daerah dapat disimpulkan semakin baik. Dari tabel IV. 4 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten

⁴⁰Primandita dkk, *Bunga Rampai Keuangan Negara* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020), hlm. 116.

Labuhanbatu tahun 2017 sebesar 1,04%, mengalami peningkatan 7,07% tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 sebesar 1,03% dan 1,01% pada tahun 2020, mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 sebesar 0,92%

Ini berarti jumlah belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya sehingga berdampak pada keefisiensinya kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2021. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu mencari sumber penerimaan lain seperti melakukan pinjaman berupa DAU, DAK, serta dana perimbangan agar jumlah pengeluaran dapat dipenuhi. Namun kebijakan ini dapat berdampak pula pada meningkatnya utang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap pihak pemberi pinjaman.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian diketahui pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017 sebesar 17,32%, yang masuk dalam kategori rendah sekali, dikarenakan tingkat kemandirian yang berada diantara 0% - 25%. Kemudian pada tahun

2018 memperoleh tingkat kemandirian sebesar 0,07% yang mengalami penurunan, dimana dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,32%, yang mana pada tahun 2019 dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif, dan 0,07% pada tahun 2020 yang digategorikan rendah sekali, karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2021 sebesar 14,6% dikategorikan rendah sekali dan dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%.

Rasio kemandirian pada kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun ditinjau dari rasio kemandirian ppada tahun 2017-2021, dikatakan pola hubungan instruktif (rendah sekali), karena, sangat bergantung pada pemerintah pusat dan juga belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Sejalan dengan penelitian Arfan Prasetya (2019) menyatakan keuangan daerahnya belum mandiri. Sejalan dengan penelitian Syafia Nurul Aeni (2020) yang menyatakan bahwa keuangan daerahnya mengalami penurunan, sehingga dikatakan rasio kemandiriannya belum mandiri.

2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai rasio sebesar 77,63% dalam kriteria kurang efektif karena berada di 75%-89% dan pada tahun

2018 sebesar 29,83% dikategorikan tidak efektif karena dalam presentase efektivitas <75 , Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu menjadi 77,63% dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2020 menjadi 29,83% yang dimana tidak efektif. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan 58,82% sama halnya pada tahun sebelumnya dikatakan tidak efektif (<75) pada presentase efektivitas. Pada dasarnya analisis rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan belum efektif apabila rasio yang dicapai masih dibawah 75%.

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, begitu juga sebaliknya. Semakin rendah rasio efektivitas yang diperoleh. Kemampuan kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efektivitas, dikatakan belum efektif dalam merealisasikan dalam pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sejalan dengan penelitian Syafia Nurul Aeni (2020) yang menyatakan bahwa keuangan daerah belum efektif. Sejalan dengan penelitian Rindang Arumdari (2019) menyatakan bahwa rasio efektivitas dikatakan belum efektif.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pada tahun 2018/2017 sebesar -0,90%, dan pada tahun 2019/2018 naik menjadi 5,98% . Sedangkan pada tahun

2020/2019 mengalami menjadi -0,29%, dan pada tahun 2021/2020 sebesar 0,71%. Dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran tahun 2017-2021 semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan hanya pada tahun 2019/2020 memiliki hasil positif. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021 dikatakan masih belum berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, karena selama 5 tahun rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga dikatakan belum stabil.

Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah dapat mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD. Sejalan dengan Rindang Arumdari (2019) dimana menyatakan bahwa keuangan daerahnya belum stabil, sejalan dengan penelitian Syafia Nurul Aeni (2020) yang mengalami rasio pertumbuhan belum baik.

4. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai 1,04% dikatakan sangat efisiensi karena berada <5 , kemudian pada tahun

2018 mengalami peningkatan sebesar 7,07% dikatakan efisiensi karena berada pada 5- 10. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,03% dikategorikan sangat efisiensi, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 1,01% dikategorikan sangat efisiensi , dan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar 0,92% dikategorikan efisiensi karena bedara pada <5 .

Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efisiensi, dikategorikan sangat efisiensi, karena kemampuan daerah kabupaten labuhanbatu dalam menjalankan tugas sesuai dengan kategori rasio efisiensi apabila yang dicapai minimal 1 (satu) atau dibawah 100 persen dikatakan sangat efisien. Sejalan dengan penelitian Arfan Prasetya (2019) yang dimana rasio efisiensi nya menyatakan bahwa sangan efisien.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang benar dilakukan menggunakan panduan yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh akademik. Namun dalam penelitian yang mendapatkan hasil yang sempurna tentunya tidak semudah yang dibayangkan, beberapa keterbatasan yang peneliti rasakan pada saat menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti masih memiliki keterbatasan

2. Dalam proses observasi langsung ke lapangan peneliti menghadapi beberapa kendala yaitu, kesulitan untuk melakukan observasi ke BPKAD Kabupaten Labuhan Batu yang memiliki keterbatasan dalam mengambil data tahunan dalam penelitian, yang mana data hanya boleh diambil 5 tahun.
3. Keterbatasan waktu, tenaga, dan dana peneliti yang tidak mencukupi dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menggunakan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai 17,32%, pada tahun 2018 mencapai 0,07%, pada tahun 2019 mencapai 17,32%, pada tahun 2020 mencapai 0,07%, dan pada tahun 2021 mencapai 14,64%. Sehingga berdasarkan pengukuran rasio kemandirian pada tahun 2017-2021 masuk dalam kategori rendah sekali, karena hasil pengukuran yang berada pada posisi 0%-25%.
2. Pengukuran pada rasio efektivitas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 sebesar 77,63%, pada tahun 2018 sebesar 29,83%, pada tahun 2019 sebesar 77,63%, dan tahun 2020 sebesar 29,83%, dan pada tahun 2021 mencapai 58,22% . Sehingga pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 masuk dalam kategori kurang efektif, karena hasil pengukuran berada di posisi 75%-89%. Sedangkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 masuk dalam kategori tidak efektif, karena hasil pengukuran berada < 75%.
3. Pertumbuhan APBD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018/2017 mencapai hasil pengukuran sebesar -0,90%, pada tahun 2019/2018

mencapai 5,98%, pada tahun 2020/2019 mencapai -0,29%, dan pada tahun 2021/2020 mencapai 0,17%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada rasio ini masuk dalam kategori tidak berhasil, karena hasil pengukuran berada di posisi <30%.

4. Efisiensi pendapatan asli daerah pada Kabupaten Labuhanbatu pada tahun anggaran 2017 mencapai 1,04%, tahun 2018 sebesar 7,07%, tahun 2019 sebesar 1,03%, dan pada tahun 2020 sebesar 1,01%, sampai pada tahun 2021 sebesar 0,92%. Sehingga hasil pengukuran pada rasio efisiensi pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021 masuk pada kategori sangat efisiensi, karena hasil pengukuran yang menunjukkan <5%. Sedangkan pada tahun 2018 masuk pada kategori efisiensi karena hasil pengukuran yang berada 5%– 10%.

B. Saran

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten labuhanbatu dalam mengelola keuangan daerahnya dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar pungutan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang ideal dan bersifat kontinu, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu harus selalu berusaha menggali

sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan membuat peraturan daerah bagi beberapa sektor pajak yang dianggap potensial. Pemerintah daerah harus dapat memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus lebih transparansi dalam menyusun anggaran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Syafia Nurul. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019. Skripsi: Politeknik Harapan Bersama, 2020.
- Arde Irvi Nurul Husna, Arman Permansyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam*. Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, 2021.
- Artha, Ni Putu Myari. *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Arumdi, Rindang. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Azizah, Siti. *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah Ilmu Peternakan*. Malang: UB. Press, 2021.
- Ana Sopanah, dkk. *Akutansi Publik*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020.
- . *Akutansi Publik*. Surabaya: Media Pustaka, 2020.
- Bambang Sudaryana, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Dr. Harmovinsah, dkk. *Akutansi Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Evanirosa, dkk. *Penelitian Perpustakaan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Fahmi. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018
- Hs Sufyati, dkk. *Indikator Keuangan & Non Keuangan*. Cirebon: Penerbit Insania, “<http://www.sibijakgresik.info/index.php/isibuku/isibab1/1/02>,” t.t.
- Hutabarat, Francis. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.

- Kurhayadi, dkk. Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- . Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Koton, Yosep P. Restrukturisasi Organisasi. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Kustia, Ayu. Analisis Rasio Pengelola Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.
- Mulyanto. Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe: Bappeda Lhokseumawe, 2018.
- Murni Dahlena Nasution, Jumita Putri Rajana Harahap. “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan pada Kinerja Pemerintah Kota Pedan.” dalam jurnal Administrasi Bisnis 8, No. 1 (2019).
- Nur Ahmad Budi Yuliyanto, dkk. Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: Polinema Press, 2018.
- Nadhiroh, Anis Nur. Pemberian Upah Pekerja/Buruh yang Adil dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jakarta: Guepidia, 2020.
- Ningrum, Endah Prawesti. Nilai Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Norma. Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Primandita, dkk. Bunga Rampai Keuangan Negara. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020.
- Prasetya, Arfan. Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Primanto, Aji. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Purnama, Gusti Ayu. Akutansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

- Ruki Ambar, dkk. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Ruki Ambar Arum, dkk. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Sari, Maya. Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance. Jawa Timur: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M Quraish. Al-Quran dan Maknanya. Jawa Timur: Lentera Hati, 2021.
- Suriani, Dr. Seri. Analisis Laporan Keuangan Kinerja Manajemen dan Prospek. Malang: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Via Lita Bethry Anlia, Sufyati HS. Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi. Cirebon: Insania, 2021.
- Wisnu U.R, Dicky. Teori Organisasi Struktur dan Desain. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir: Rantauprapat, 16 April 2000
4. Anak Ke : 1 (Satu) dari Empat Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswi
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Jl. Kampung Baru Gg. Prima No.12. Kelurahan
Kartini, Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu,
9. Telepon/HP : 0852-7083-8833
10. E-mail : efrilisaasnunahsb@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama
Ayah : Asari Hasibuan
Ibu : Nurainun Pohan
2. Pekerjaan
Ayah : Wiraswasta
Ibu : -
3. Alamat

Ayah : Jl. Kampung Baru Gg. Prima No.12. Kelurahan Kartini,
Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu,

Ibu :Jl. Kampung Baru Gg. Prima No.12. Kelurahan Kartini,
Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu,

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112140 (2006-2012)
2. SMP Negeri 2 Rantau Selatan (2012-2015)
3. SMA Negeri 2 Pangkatan (2015-2018)
4. UIN SYAHADA Padangsidempuan (2018 - Sekarang)

D. MOTTO HIDUP

- Semua keberhasilan terbaikmu, datang setelah kekecewaan besar yang kamu hadapi dengan sabar dan terus berdoa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Fadil Hidayat, Kasubbid pengelolaan belanja SKPD Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1. Bagaimana gambaran umum atau profil yang bapak ketahui mulai dari awal berdirinya kantor tersebut dan bisa menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah yang bapak mengetahui apa yang dimaksud visi dan misi?
3. Jika iya?bagaimana sih visi yang bapak ketahui dan seperti apa visi?
4. Terkait Pengelolaan keuangan daerah, bagaimana partisipasi masyarakat?
5. Apa saja tugas dan fungsi pad Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
6. Apakah pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN	1.315.981.548.668,00	133.747.770.325,97	70,95	1.312.715.109.320,71
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225.869.464.200,00	67.379.199.960,97	29,83	175.334.946.116,71
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57.700.000.000,00	43.999.141.535,57	72,30	45.851.736.968,65
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.170.131.200,00	4.565.129.348,97	52,37	4.757.345.321,55
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.440.288.000,00	6.242.333.014,00	78,95	10.242.333.014,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.559.045.000,00	118.003.927.926,34	8,49	122.972.514.365,34
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	955.305.713.468,00	866.368.570.365,00	90,69	1.012.228.495.149,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	849.687.879.118,00	803.359.127.401,00	94,55	925.148.005.724,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.699.821.734,00	36.126.122.911,90	52,82	37.647.222.823,98
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.840.806.384,00	3.023.780.725,05	73,46	3.151.097.808,21
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	652.519.523.000,00	652.312.325.350,00	97,13	679.778.107.470,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	143.627.728.000,00	140.428.376.450,85	97,82	195.320.097.564,57
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	105.617.834.350,00	82.726.464.953,75	59,66	86.209.684.539,75
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105.617.834.350,00	82.726.464.953,75	59,66	86.209.684.539,75
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	134.806.371.000,00	124.594.084.652,25	0,00	129.840.151.374,45
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.434.200.000,00	0,00	0,00	61.195.508.855,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	71.372.171.000,00	0,00	0,00	69.956.159.200,00
2	BELANJA	1.347.148.302.852,00	945.701.763.681,84	70,20	1.367.519.966.301,99
2.1	BELANJA OPERASI	1.146.817.154.695,00	813.905.078.907,00	70,97	1.363.614.117.022,99
2.1.1	Belanja Pegawai	624.142.571.836,00	532.528.059.241,00	85,32	1.179.115.053.797,99
2.1.2	Belanja Barang	310.996.532.659,00	164.995.534.436,00	53,05	5.969.821.397,00
2.1.5	Belanja Hibah	74.417.946.500,00	68.763.561.380,00	92,40	30.669.655.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	498.600.000,00	28,49	1.540.120.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	135.510.103.700,00	47.119.323.850,00	34,77	146.319.466.828,00
2.2	BELANJA MODAL	146.331.148.157,00	106.608.813.577,00	72,85	408.119.200,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.425.772.550,00	16.417.642.349,00	64,57	206.621.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	40.844.262.846,00	37.878.000.218,00	92,74	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.160.167.413,00	48.114.699.766,00	81,33	201.498.200,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.900.945.348,00	4.198.471.244,00	20,09	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	22.675.119.139,50	45,35	1.494.950.500,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	50.000.000.000,00	22.675.119.139,50	45,35	1.494.950.500,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2020	2020		2019
2.4	TRANSFER	4.000.000.000,00	2.512.752.058,34	62,82	2.002.779.579,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	4.000.000.000,00	2.512.752.058,34	62,82	2.002.779.579,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	4.000.000.000,00	2.512.752.058,34	62,82	2.002.779.579,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.166.754.184,00)	(11.953.993.355,87)	38,35	(48.804.856.981,28)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	31.766.754.184,00	31.766.754.183,84	100,00	90.364.371.720,12
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	31.766.754.184,00	31.766.754.183,84	100,00	89.892.319.720,12
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	472.052.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	9.792.760.555,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	9.192.760.555,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	31.166.754.184,00	31.166.754.183,84	100,00	80.571.611.165,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	19.212.760.827,97	0,00	31.766.754.183,84

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2021	2021		2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.363.423.473.097,00	1.094.201.970.193,41	80,25	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	239.690.323.904,00	139.566.608.578,41	58,23	0,00
4.1.1	Pajak Daerah	113.830.121.950,00	114.711.878.386,00	100,77	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	9.225.131.200,00	5.658.338.871,15	61,34	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.135.070.754,00	12.136.721.336,00	100,01	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	104.500.000.000,00	7.059.669.985,26	6,76	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.036.240.365.193,00	950.575.832.700,00	91,73	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.240.365.193,00	879.511.346.895,00	91,98	0,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	881.762.948.193,00	879.511.346.895,00	99,74	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	74.477.417.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000,00	71.064.485.805,00	88,83	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80.000.000.000,00	71.064.485.805,00	88,83	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.492.784.000,00	4.059.528.915,00	4,64	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.800.000.000,00	4.059.528.915,00	144,98	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.692.784.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.377.938.913.408,00	1.009.426.053.168,53	73,26	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.056.287.743.551,00	805.088.927.300,01	76,22	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	608.993.749.588,00	553.853.602.643,00	90,95	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	424.560.200.084,00	234.456.060.778,01	55,22	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	18.516.793.879,00	16.310.063.879,00	88,08	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.217.000.000,00	469.200.000,00	11,13	0,00
5.2	BELANJA MODAL	142.566.208.707,00	108.462.560.128,52	76,08	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.170.129.992,00	43.421.582.504,00	78,70	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.091.684.751,00	13.224.443.954,52	65,82	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.660.875.964,00	51.249.849.670,00	76,88	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	643.518.000,00	566.684.000,00	88,06	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.500.000.000,00	4.087.725.350,00	38,93	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	4.087.725.350,00	38,93	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	168.584.961.150,00	91.786.840.390,00	54,45	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.100.000.000,00	6.903.000.000,00	75,86	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	159.484.961.150,00	84.883.840.390,00	53,22	0,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.515.440.311,00)	84.775.917.024,88	(584,04)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.268.872.811,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.268.872.811,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.753.432.500,00	6.753.432.500,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.160.000.000,00	6.160.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	593.432.500,00	593.432.500,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.515.440.311,00	(6.753.432.500,00)	(46,53)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	78.022.484.524,88	0,00	0,00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 862/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

23 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu,

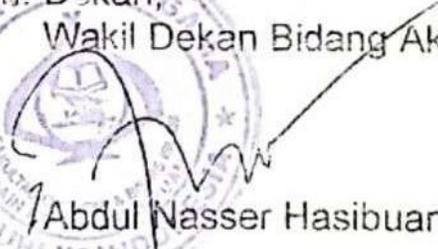
1. Azwar Hamid : Pembimbing I
2. Zulaika Matondana : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM : 1840200101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2651 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2022
Hal : Mohon Izin Riset

27 Oktober 2022

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM : 1840200101
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Efrilisa Asnuna Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2649 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2022
Hal : Mohon Izin Pra Riset

27 Oktober 2022

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Efrilisa Asnuna Hasibuan
NIM : 1840200101
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. (0624) 21113-113
 RANTAUPRAPAT

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/2237/BKBP-III/2022

- Membaca : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : 2651/ In.14/G.1/G.4c/ TL.00/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022, perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : EFRILISA ASNUNA HASIBUAN.
 Alamat : Jl. Kampung Baru, Gg Prima No 12.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Judul Penelitian : *"Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu"*.
- Tempat Penelitian : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 Lamanya Penelitian : 1 Minggu.
 Penanggung Jawab : Abdul Nasser Hasibuan.
 Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian.

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di : Rantauprapat
 Pada tanggal : 03 November 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LABUHANBATU
 H. NILWANSYAH,SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680401 199703 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN H.M. IDRIS HASIBUAN NO. TELP. (0624) 21173 FAX.. 24815
RANTAUPRAPAT

Nomor : 800/3300 /BPKAD/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Tempat
Izin Penelitian
Efrilisa Asnuna Hasibuan

Rantauprapat, 7 November 2022

Kepada Yth.
Fak. Ekonomi dan Bisnis
Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidimpuan

di-

Padang Sidimpuan

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. 070/2236/BKBP-III/2022 tanggal 03 November 2022 perihal Izin Penelitian, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menerima Mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian dimaksud mulai tanggal 07 November 2022 sampai 12 November 2022
2. Perlu kami sampaikan bahwa selama mengikuti kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu setiap peserta Penelitian harus sanggup untuk mentaati setiap ketentuan yang berlaku di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan kedisiplinan dan ketentuan lainnya.
3. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU



SALMAN ALPHARISI RAMBE, S.Sos.MM

011-9781128 200502 1 004

Efrilisa Asnuna Hasibuan

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

1%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

3

core.ac.uk

Internet Source

1%

4

perpustakaan.poltektegal.ac.id

Internet Source

1%

5

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

<1%

6

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

8

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

9

info.trilogi.ac.id

Internet Source

<1%